

## KAJIAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENCAPAI TARGET SWASEMBADA BERAS

Nikolaus Dionesius Budiman<sup>1)\*</sup>, Lorensius Santu<sup>2)</sup>

<sup>1)\*</sup>Fakultas Pertanian Dan Peternakan, Universitas katolik Indonesia santu Paulus ruteng, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, email : [kembar45nikolaus@gmail.com](mailto:kembar45nikolaus@gmail.com)

<sup>2)</sup>Fakultas Pertanian Dan Peternakan, Universitas katolik Indonesia santu Paulus Ruteng, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, email : [lorensiussantu31121962@gmail.com](mailto:lorensiussantu31121962@gmail.com)

\*Penulis Korespondensi : E-mail: [kembar45nikolaus@gmail.com](mailto:kembar45nikolaus@gmail.com)

### ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan pemerintah dalam mencapai swasembada beras di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik, kami menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah, dinamika pasar, dan perubahan iklim saling mempengaruhi produksi beras. Penelitian ini menyoroti pentingnya inisiatif seperti P2BN, UPSUS Pajale, dan PAT dalam mengoptimalkan praktik pertanian dan meningkatkan produktivitas. Namun, tantangan seperti variabilitas iklim, konversi lahan, dan kenaikan biaya input terus mengancam produksi beras. Studi ini menekankan pentingnya pendekatan terintegrasi yang menggabungkan kemajuan teknologi, peningkatan infrastruktur, dan dukungan petani. Meskipun telah terjadi peningkatan produksi beras, keberlanjutan upaya-upaya ini dan dampak jangka panjangnya terhadap ketahanan pangan tetap menjadi perhatian utama. Penelitian lebih lanjut harus fokus pada mengevaluasi trade-off antara keuntungan jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang, serta mengeksplorasi solusi inovatif untuk mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi sektor beras di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Kebijakan Pemerintah, Produksi Beras, Wasembada Beras*

### PENDAHULUAN

Swasembada beras merupakan tujuan strategis pemerintah Indonesia untuk memastikan ketersediaan pangan pokok bagi seluruh masyarakat. Upaya mencapai swasembada ini melibatkan berbagai strategi kompleks yang mencakup aspek pertanian, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan: Undang-undang ini secara umum mengatur tentang pangan, mulai dari produksi hingga konsumsi. Di dalamnya terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan, termasuk swasembada. Swasembada beras

merupakan isu strategis bagi Indonesia, mengingat beras merupakan komoditas pangan pokok yang sangat penting bagi masyarakat. Keberhasilan mencapai swasembada beras tidak hanya menjamin ketersediaan pangan, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan nasional dan stabilitas harga.

Beras sebagai makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia menjadikan swasembada beras menjadi isu strategis yang krusial. Ketergantungan pada impor beras selama beberapa dekade terakhir telah menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari fluktuasi harga hingga

ancaman terhadap ketahanan pangan nasional. Pemerintah Indonesia telah berupaya keras untuk mencapai swasembada beras melalui berbagai kebijakan dan program. Namun, tantangan seperti perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan persaingan global masih menghantui upaya tersebut. Kebijakan pemerintah merupakan faktor kunci dalam pencapaian swasembada beras. Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait sektor pertanian, termasuk program cetak sawah, perbaikan irigasi, dan pemberian subsidi pupuk. Undang-undang Pangan mewajibkan pemerintah untuk menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Beras, sebagai makanan pokok utama Indonesia, menjadi perhatian utama. Meskipun konsumsi beras per kapita cenderung menurun, namun kebutuhan beras masih tinggi. Perubahan pola konsumsi masyarakat, dengan meningkatnya konsumsi di luar rumah, memengaruhi pola stok beras. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam untuk memastikan ketersediaan beras yang cukup dan berkelanjutan.

Sebagai kebutuhan dasar manusia, pangan menjadi prioritas utama bagi setiap negara. Indonesia, dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan alih fungsi lahan yang terus terjadi, dihadapkan pada tantangan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Pemerintah perlu merancang kebijakan yang komprehensif untuk meningkatkan produksi, menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian, dan memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Beras memiliki peran sentral dalam perekonomian dan kehidupan sosial politik Indonesia. Pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan untuk menjamin ketersediaan

beras, mulai dari intensifikasi dan ekstensifikasi produksi hingga pengaturan impor, harga, dan distribusi. Namun, sejumlah kendala menghambat efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut (Dewi, 2018). Swasembada pangan adalah kemampuan suatu negara, dalam hal ini Indonesia, untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduknya sendiri. Dengan meningkatkan produksi pangan lokal melalui berbagai upaya seperti pengembangan infrastruktur pertanian, penyediaan teknologi, dan diversifikasi pangan. Tujuan utama swasembada pangan adalah untuk mencapai ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan.

Produksi beras Indonesia cenderung meningkat, namun fluktuatif. Meskipun surplus, Indonesia masih mengimpor beras. Studi ini menunjukkan bahwa impor beras juga mengalami fluktuasi, dengan penurunan signifikan pada tahun 2017. Untuk mengurangi ketergantungan pada impor, perlu ada upaya diversifikasi konsumsi pangan (Rahayu & Febriaty, 2019). Keterlibatan petani dalam program pemuliaan tanaman padi dapat meningkatkan efisiensi proses seleksi varietas. Petani dapat memberikan masukan mengenai karakteristik yang diinginkan pada varietas baru, seperti rasa, umur panen, dan ketahanan terhadap hama penyakit. Selain itu, petani juga dapat berperan sebagai multiplikator benih varietas unggul (Aristya & Taryono, 2019). Upaya pemerintah untuk mencapai swasembada beras tidak hanya berdampak pada ketahanan pangan nasional, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas bagi perekonomian dan posisi Indonesia di tingkat internasional. Dengan menjadi lumbung pangan dunia, Indonesia dapat meningkatkan pendapatan negara dan memperkuat posisi tawar dalam

perdagangan global. Kenaikan harga beras di Indonesia pada tahun 2023 mendorong pemerintah untuk mengambil sejumlah langkah, seperti impor beras, menjaga stok Bulog, operasi pasar, dan bantuan pangan. Penelitian ini menganalisis efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut dalam mengatasi masalah inflasi pangan (Sholikhah et al., 2023).

Kebijakan pemerintah mendukung pengembangan beras organik di Indonesia. Namun, penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya efisien karena belum adanya lembaga yang menyediakan input organik secara terintegrasi. Meskipun demikian, kebijakan ini telah memberikan dampak positif bagi petani organik dalam hal penerimaan finansial dan sosial (Jakayah et al., 2016). Transformasi sektor pertanian Indonesia tidak hanya berdampak pada ketahanan pangan nasional, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas bagi perekonomian dan posisi Indonesia di tingkat internasional. Dengan menjadi lumbung pangan dunia, Indonesia dapat meningkatkan pendapatan negara dan memperkuat posisi tawar dalam perdagangan global. Kabupaten Merauke memiliki peran strategis dalam upaya Indonesia untuk mencapai swasembada beras dan menjadi lumbung pangan dunia. Dengan potensi lahan yang luas dan dukungan pemerintah, Merauke diharapkan dapat menjadi pusat produksi beras nasional. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam mencapai swasembada beras, mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan dan implementasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan.

Pangan bukan hanya soal memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga terkait dengan budaya, ekonomi, dan politik suatu bangsa. Pemerintah

Indonesia telah menetapkan target swasembada pangan dan melakukan berbagai reformasi di sektor pertanian. Konsep "reframing", "restructuring", "revitalizing", dan "renewing" menjadi landasan dalam transformasi Kementerian Pertanian. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan organisasi yang lebih efektif, melibatkan berbagai pihak, dan beradaptasi dengan perubahan. Meskipun telah mencapai kemajuan, menjaga keberlangsungan swasembada pangan tetap menjadi tantangan besar yang memerlukan komitmen jangka panjang. Keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada beras pada masa lalu menunjukkan potensi besar sektor pertanian. Namun, untuk menghadapi tantangan era industri 4.0, diperlukan transformasi mendalam dalam sektor pertanian. Modernisasi pertanian dengan memanfaatkan teknologi informasi dan mekanisasi pertanian yang terintegrasi akan menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan.

Pemerintah perlu memastikan petani memiliki akses yang lebih baik terhadap lahan, air, dan modal, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan pertanian (Wardhani 2019). Ketersediaan beras di Indonesia masih menjadi tantangan. Fluktuasi produksi dan konsumsi yang tidak seimbang menyebabkan ketidakstabilan pasokan. Penelitian ini menggunakan model sistem dinamik untuk merancang skenario peningkatan produksi beras. Hasilnya menunjukkan bahwa skenario peningkatan ekspor, penambahan cadangan pemerintah, dan peningkatan produksi padi merupakan pilihan terbaik untuk mencapai ketahanan pangan dalam 10 tahun ke depan (Sintiya, 2023). Swasembada beras merupakan tujuan strategis Indonesia untuk meningkatkan

ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan intervensi pasar untuk mendukung produksi beras. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan Badan Usaha Milik Negara dalam pasar beras telah menciptakan distorsi pasar dan mengurangi efisiensi. Untuk mencapai swasembada beras yang berkelanjutan, perlu dilakukan reformasi kebijakan beras dengan mengurangi intervensi pemerintah dan mendorong mekanisme pasar yang lebih kompetitif (Nuryanti, 2017).

Penelitian ini bertujuan Memahami secara mendalam strategi dan kebijakan yang telah dan sedang dilakukan pemerintah Indonesia dalam upaya mencapai target swasembada beras. Efektivitas dan efisiensi strategi dan kebijakan tersebut. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pencapaian target swasembada beras.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kepustakaan dengan memanfaatkan data sekunder yang telah dipublikasikan. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk BPS nasional, publikasi pemerintah, jurnal ilmiah, dan database online. Analisis data dilakukan secara mendalam untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antara variabel penelitian.

### **HASIL PENELITIAN**

Dalam upaya meningkatkan produksi beras di tengah tantangan perubahan iklim, Kementerian Pertanian telah meluncurkan program pompanisasi. Program ini bertujuan mengoptimalkan lahan rawa dan lahan

tadah hujan melalui pembangunan sistem pengairan menggunakan pompa air. Bulog, sebagai mitra strategis, mendukung penuh program ini dan optimistis dapat menyerap hasil panen petani dalam jumlah yang lebih besar. Kolaborasi antara kedua lembaga ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional dan memenuhi kebutuhan beras masyarakat.

### **Strategi Dan Kebijakan Yang Telah dan Sedang Dilakukan Pemerintah Indonesia**

Kebijakan Produksi Melalui Peningkatan Produksi, Bantuan Benih Dan Pupuk, Pengembangan Teknologi Pertanian, Dan Mekanisasi Pertanian. Kombinasi antara penyediaan benih unggul, pupuk berkualitas, mekanisasi, dan penerapan teknologi pertanian modern merupakan kunci untuk mencapai peningkatan produksi pertanian yang berkelanjutan. Dengan mengadopsi teknologi modern, memperbaiki sistem irigasi, dan memberikan dukungan kepada petani, Indonesia dapat mencapai ketahanan pangan tanpa merusak lingkungan. Program ekstensifikasi lahan seperti food estate terbukti tidak efektif dan berdampak buruk pada lingkungan. Pemerintah perlu meningkatkan investasi di sektor pertanian, mendorong inovasi, dan memberikan pelatihan kepada petani untuk mencapai tujuan ini. Teknologi ini telah meningkatkan efisiensi produksi, menghubungkan petani dengan pasar yang lebih luas, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi petani, serta perluasan akses terhadap infrastruktur teknologi di daerah pedesaan (Sudarwati & Nasution, 2024). Pengembangan alsintan di Indonesia perlu disesuaikan dengan kondisi

agroekologis dan sosial ekonomi yang beragam. Penelitian ini menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penggunaan alsintan, seperti penyediaan infrastruktur pendukung, pelatihan petani, dan pengembangan lembaga penyedia jasa alsintan. Dengan dukungan yang memadai, alsintan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi produksi pertanian dan kesejahteraan petani (Aldillah, 2016)

Program Nyata Pemerintah Untuk Meningkatkan Produksi Beras

#### **Program P2BN**

Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi padi melalui intensifikasi pertanian. Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk mencapai swasembada beras melalui optimalisasi potensi produksi padi. Program ini telah berhasil meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pendapatan petani, sekaligus berkontribusi pada ketahanan pangan nasional.

Luas panen padi pada 2024 diperkirakan sekitar 10,05 juta hektare, mengalami penurunan sebanyak 167,25 ribu hektare atau 1,64 persen dibandingkan luas panen padi di 2023 yang sebesar 10,21 juta hektare. Produksi padi pada 2024 diperkirakan sebesar 52,66 juta ton GKG, mengalami penurunan sebanyak 1,32 juta ton GKG atau 2,45 persen dibandingkan produksi padi di 2023 yang sebesar 53,98 juta ton GKG. Produksi beras pada 2024 untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan sekitar 30,34 juta ton, mengalami penurunan sebanyak 757,13 ribu ton atau 2,43 persen dibandingkan produksi beras di 2023 yang sebesar 31,10 juta ton (BPS, 2024)

#### **Program UPSUS Pajale**

Program ini berupa perbaikan jaringan irigasi dan sarana pendukungnya untuk meningkatkan produksi padi, jagung, dan kedelai. Program UPSUS Pajale merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk mencapai swasembada pangan melalui peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai. Program ini dilakukan dengan cara mengoptimalkan penggunaan sumber daya pertanian, seperti lahan, air, pupuk, dan benih. Indonesia, sebagai negara agraris, pernah mencapai swasembada pangan. Namun, program UPSUS Pajale yang bertujuan meningkatkan produksi padi di Aceh Besar justru mengalami penurunan hasil panen. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi program tersebut kurang efektif dalam meningkatkan produksi dan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah (Maulana et al., 2017). Program UPSUS Pajale bertujuan untuk mencapai swasembada pangan. Penelitian di Kecamatan Terara menunjukkan bahwa program ini berhasil meningkatkan produksi padi. Namun, masih ada beberapa kendala yang dihadapi, baik di tingkat petani maupun penyuluh. Untuk meningkatkan efektivitas program, disarankan agar pendampingan petani dimulai sejak awal musim tanam dan kesejahteraan penyuluh ditingkatkan (Sari & Sjah, 2015).

#### **Program PAT**

Program ini dilakukan melalui pompanisasi untuk mengatasi kekeringan lahan tadah hujan. Program Perluasan Areal Tanam (PAT) merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian, terutama di daerah yang sering mengalami kekeringan. Program ini dilakukan dengan cara memasang pompa air di lahan pertanian dan memberikan panduan kepada petani tentang cara menggunakan pompa air

secara efektif. Tujuannya, agar petani dapat mengoptimalkan penggunaan air, meningkatkan indeks tanam, dan pada akhirnya meningkatkan produksi pertanian. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga ketahanan pangan nasional dengan meluncurkan program pompanisasi sebagai respon terhadap dampak El Niño. Melalui program ini, pemerintah berhasil meningkatkan produksi padi dan mengamankan pasokan pangan bagi masyarakat. Untuk mengatasi kekeringan panjang yang mengancam produksi pangan, pemerintah Indonesia telah gencar melakukan program pompanisasi. Dengan memasang pompa air di lahan pertanian, petani dapat menanam lebih sering dan meningkatkan hasil panen. Program ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan produksi beras dan menjaga ketahanan pangan nasional.

#### **Perbaikan paket teknologi budidaya dan pasca panen**

Pemerintah meningkatkan paket teknologi budidaya dan pasca panen untuk meningkatkan produksi beras. Pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi beras dengan memperkenalkan teknologi baru di bidang pertanian. Mulai dari teknologi panen, irigasi, penggilingan, penyimpanan, hingga budidaya, semua dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas petani. Penelitian intensif telah dilakukan untuk meningkatkan produktivitas padi di Kepulauan Riau. Melalui berbagai uji coba, ditemukan bahwa penggunaan varietas unggul, pengelolaan lahan yang baik, dan penerapan sistem irigasi yang tepat dapat secara signifikan meningkatkan hasil panen. Proses pascapanen padi sangat penting untuk menentukan kualitas beras yang dihasilkan. Tahapan seperti panen, perontokan, pengeringan, dan

penyimpanan harus dilakukan dengan benar untuk menghindari kerusakan dan kehilangan hasil. Sayangnya, banyak petani masih belum menerapkan teknologi pascapanen yang tepat (Hasbi et al., 2012). Inovasi teknologi sangat penting untuk meningkatkan produksi padi di Kepulauan Bangka Belitung. Dengan menggunakan varietas unggul, sistem tanam yang lebih efisien, dan teknologi modern seperti drone, diharapkan dapat meningkatkan hasil panen dan kualitas beras.

#### **Peningkatan mutu intensifikasi**

Pemerintah meningkatkan mutu intensifikasi untuk meningkatkan produksi beras. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi beras, termasuk melalui intensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian adalah upaya untuk meningkatkan hasil panen dari lahan yang sudah ada dengan cara yang lebih efisien. Salah satu teknologi yang digunakan adalah perbaikan mutu intensifikasi (PMI), yang diterapkan di daerah-daerah penghasil padi utama. Selain PMI, pemerintah juga mendorong penggunaan varietas unggul, perbaikan teknik budidaya, dan rehabilitasi lahan.

#### **Peningkatan luas areal pertanaman**

Pemerintah meningkatkan luas areal pertanaman untuk meningkatkan produksi beras. Untuk mencapai target swasembada beras pada tahun 2027, pemerintah Indonesia sedang berupaya meningkatkan produksi padi dengan berbagai cara. Selain memperluas lahan pertanian, pemerintah juga memperbaiki kualitas produksi melalui berbagai inovasi teknologi. Daerah-daerah dengan potensi lahan besar seperti Merauke menjadi fokus utama dalam upaya ini.

#### **Rehabilitasi lahan**

Pemerintah melakukan rehabilitasi lahan untuk meningkatkan produksi beras. Kementerian Pertanian

berupaya meningkatkan luas tanam padi, terutama di lahan-lahan yang selama ini tidak termanfaatkan. Caranya adalah dengan mengoptimalkan sumber air dan melakukan penanaman padi di lahan perkebunan. Untuk meningkatkan produksi padi, pemerintah mendorong petani untuk menanam padi lebih sering dalam setahun, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi lahan seperti Banyuasin. Pemerintah memberikan berbagai dukungan, seperti penyediaan benih unggul, alat pertanian modern, dan pelatihan bagi petani. Tujuannya adalah agar Indonesia bisa mandiri dalam produksi beras dan tidak perlu lagi mengimpor. Penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lebong memiliki potensi besar untuk meningkatkan produksi padi. Namun, masih ada beberapa kendala yang harus diatasi, seperti kurangnya pengetahuan petani dan terbatasnya fasilitas pertanian. Untuk mengatasi masalah ini, peneliti menyarankan agar pemerintah daerah lebih aktif dalam memberikan pelatihan kepada petani dan memperkenalkan teknologi pertanian yang lebih modern

#### **Pencetakan lahan sawah pertanian baru**

Pemerintah mencetak lahan sawah pertanian baru untuk meningkatkan produksi beras. Pemerintah menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional yang terus meningkat. Salah satu solusinya adalah dengan mengembangkan lahan-lahan rawa di Kalimantan Tengah menjadi sawah produktif. Meskipun ada beberapa kendala, seperti lahan yang belum tergarap, pemerintah optimis program ini akan berhasil dengan dukungan dari berbagai pihak. Untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan konflik yang dapat mengganggu pasokan pangan, pemerintah Indonesia

berkomitmen untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Salah satu caranya adalah dengan membuat lahan sawah baru. Program ini diharapkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan petani. Program cetak sawah baru seringkali hanya fokus pada pembuatan sawah yang baru, tanpa memperhatikan aspek sosial seperti siapa yang akan mengelola sawah tersebut dan bagaimana kepemilikan tanahnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak masalah yang muncul, seperti pemilihan lokasi yang kurang tepat dan pola kepemilikan tanah yang tidak jelas (Rahmadani et al., 2019)

#### **Efektivitas dan Efisiensi Strategi Dan Kebijakan**

##### **Terjadi Peningkatan Produksi Beras**

Produksi beras nasional menunjukkan tren positif, terutama pada Agustus dan September, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Kepala Badan Pangan Nasional mengapresiasi upaya Kementerian Pertanian yang telah berhasil meningkatkan produksi beras. Berbagai program seperti optimasi lahan rawa dan pompanisasi telah memberikan hasil yang signifikan. Selain itu, kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang menguntungkan petani juga mendorong peningkatan produksi. Dengan stok beras yang cukup dan upaya Bulog dalam menyerap hasil panen petani, ketahanan pangan Indonesia semakin terjamin.

##### **Ketersediaan beras: Apakah pasokan beras di pasar mencukupi untuk memenuhi kebutuhan domestik?**

Indonesia seringkali mengalami defisit beras. Produksi dalam negeri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Akibatnya, pemerintah terpaksa mengimpor beras

dari negara lain, seperti Vietnam, untuk memenuhi kekurangan pasokan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketahanan pangan Indonesia, khususnya ketersediaan beras, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Analisis data BPS menunjukkan adanya ketidakstabilan produksi beras di tengah pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Namun, hasil penelitian ini secara mengejutkan menunjukkan surplus produksi beras dan kemampuan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangan pokoknya. Surplus ini, menurut perspektif Islam, berkontribusi pada terjaganya lima aspek kesejahteraan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (Ariyanti et al., 2024)

### **Stabilitas harga beras: Apakah harga beras di pasar relatif stabil dan tidak mengalami fluktuasi yang tajam?**

Fluktuasi harga beras di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Ketika pasokan beras berkurang akibat produksi yang rendah atau kendala distribusi, harga cenderung naik karena permintaan yang tetap tinggi. Selain itu, peningkatan permintaan akibat pertumbuhan penduduk atau perubahan pola konsumsi juga dapat mendorong kenaikan harga. Kenaikan biaya produksi, seperti harga pupuk dan tenaga kerja, juga turut berkontribusi pada kenaikan harga beras. Faktor alam seperti El Nino yang menyebabkan gagal panen dapat memperparah situasi dan menyebabkan harga beras melonjak. Harga beras di Indonesia terus mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Baik beras premium, medium, submedium, maupun pecah mengalami kenaikan harga jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan harga ini terjadi secara bertahap, dengan

peningkatan yang cukup signifikan pada bulan Juli dan Agustus 2024.

### **Faktor-Faktor Menghambat Pencapaian Target Swasembada Beras.**

#### **Perubahan Iklim:**

Perubahan iklim telah mengganggu siklus musim tanam dan panen. Pergeseran musim hujan dan kemarau yang tidak menentu membuat petani kesulitan dalam menentukan waktu yang tepat untuk menanam dan memanen. Selain itu, peningkatan suhu dan kelembaban udara menciptakan kondisi yang ideal bagi pertumbuhan hama dan penyakit tanaman. Kejadian ekstrem seperti banjir dan kekeringan juga semakin sering terjadi, menyebabkan gagal panen dan kerugian ekonomi yang besar. Penurunan curah hujan akibat fenomena El Nino semakin memperparah kondisi tersebut. Ketahanan pangan di Indonesia merupakan isu strategis yang memerlukan perhatian serius. Pertumbuhan penduduk, kemiskinan, dan perubahan iklim menjadi tantangan utama dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan. Perubahan iklim telah menyebabkan gangguan pada sistem produksi pertanian, sehingga berdampak pada ketersediaan dan aksesibilitas pangan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan, meliputi peningkatan produksi, diversifikasi pangan, dan penguatan sistem distribusi pangan. Perubahan iklim telah menjadi ancaman serius bagi produksi pangan lokal, terutama bagi petani perempuan. Fluktuasi cuaca yang ekstrem, serangan hama, dan kelangkaan air telah menyebabkan penurunan hasil panen dan mengancam ketahanan pangan. Namun, sejumlah perempuan petani telah menunjukkan keuletan dalam



mengatasi tantangan ini dengan melakukan diversifikasi tanaman dan menerapkan praktik pertanian yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tanda-tanda perubahan iklim yang mempengaruhi sektor pertanian, mengukur kontribusi emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian, dan menganalisis dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim pada sektor pertanian (Rozci 2021)

#### **Keterbatasan Lahan Pertanian:**

Perubahan fungsi lahan pertanian menjadi permukiman atau kawasan industri mengancam produksi pangan. Hilangnya lahan pertanian mengurangi pasokan beras dan berdampak pada mata pencaharian petani. Selain itu, alih fungsi lahan juga menyebabkan pencemaran lingkungan dan perubahan ekosistem. Alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman memiliki dampak yang sangat kompleks dan luas. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait. Melalui perencanaan yang matang, penegakan hukum yang tegas, dan pengembangan pertanian berkelanjutan, kita dapat menjaga kelestarian lingkungan dan ketahanan pangan. Penelitian ini membuktikan bahwa perubahan lahan pertanian menjadi kawasan industri di Cilegon berdampak buruk pada hasil panen. Untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri dan ketersediaan pangan, perlu adanya aturan yang lebih ketat terkait penggunaan lahan (Abimayu, 2024). Pulau Jawa, sebagai penghasil beras terbesar di Indonesia, menghadapi ancaman serius akibat alih fungsi lahan

sawah. Studi menunjukkan bahwa konversi lahan ini terjadi dalam skala besar dan berpotensi mengganggu produksi pangan nasional. Untuk mengatasinya, pemerintah telah mengambil beberapa langkah, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan (Ashari 2003)

#### **Harga Input Pertanian yang Tinggi**

Kenaikan harga input produksi pertanian seperti pupuk, pestisida, dan BBM memaksa petani untuk mengeluarkan biaya yang lebih besar. Kondisi ini sangat berisiko, terutama ketika dihadapkan pada ketidakpastian harga jual hasil panen dan ancaman bencana alam. Kenaikan harga pupuk dan energi tidak hanya langsung meningkatkan biaya produksi, tetapi juga memicu kenaikan upah tenaga kerja dan harga bahan baku lainnya. Efek berganda ini mendorong harga pangan untuk naik ke level yang lebih tinggi. Data global menunjukkan bahwa kenaikan harga pupuk dan energi memang berkorelasi positif dengan kenaikan harga pangan. Analisis data menunjukkan bahwa peningkatan biaya pestisida secara langsung berkontribusi pada peningkatan pendapatan petani di Desa Serading. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan pestisida yang efektif sangat penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Meskipun biaya pupuk juga memberikan pengaruh positif, pengaruhnya tidak sebesar pestisida. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sekitar 97% variasi pendapatan petani dapat dijelaskan oleh variabel biaya pestisida dan biaya pupuk (Sudiyarti et al., 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM memiliki dampak yang kompleks terhadap petani padi di Desa Bugeman. Di satu sisi, kenaikan harga BBM meningkatkan biaya produksi. Di sisi lain, kenaikan harga BBM juga mendorong kenaikan harga jual hasil

panen. Meskipun demikian, peningkatan pendapatan petani tidak terlalu signifikan karena kenaikan biaya produksi hampir seimbang dengan kenaikan harga jual (Suyono & Martono Achmar, 2013)

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alben Abimayu, A. A. (2024). Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Industri Terhadap Hasil Produksi Tanaman Pangan Di Cilegon [Journal-article]. *Hidroponik : Jurnal Ilmu Pertanian Dan Teknologi Dalam Ilmu Tanaman, Vol.1(No.2)*, 26–34.  
<https://doi.org/10.62951/hidropo nik.v1i2.45>
- Aldillah, R. & Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. (2016). Kinerja Pemanfaatan Mekanisasi Pertanian Dan Implikasinya Dalam Upaya Percepatan Produksi Pangan Di Indonesia. In *Forum Penelitian Agro Ekonomi* (Vols. 34–34, Issue 2, pp. 163–177).
- Aristya, V. E., 1 & Taryono. (2019). Pemuliaan Tanaman Partisipatif untuk Meningkatkan Peran Varietas Padi Unggul dalam Mendukung Swasembada Pangan Nasional. In *Agrinova: Journal of Agriculture Innovation* (Vol. 2, Issue 1, pp. 026–035). UNIVERSITAS GADJAH MADA.  
<http://jurnal.ugm.ac.id/agrinova/>
- Ariyanti, S. D., Nabila, U., & Rahmawati, L. (2024). Pemenuhan Kebutuhan Produksi Beras Nasional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam. In Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Majalengka, *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* (Vol. 7, Issue 1, pp. 82–83) [Journal-article].  
<https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.9121>
- Ashari & Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. (2003b). TINJAUAN TENTANG ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH KE NON SAWAH DAN DAMPAKNYA DI PULAU JAWA. *Forum Penelitian Agroekonomi*, 83–98.
- Dewi, E. (2018). Analisis Kebijakan Swasembada Beras Dalam Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan. *Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita*, 29–31.
- Hasbi, Jurusan Teknologi Pertanian Universitas Fakultas Pertanian Sriwijaya Indralaya, & Pusat Unggulan Riset Pengembangan Lahan Suboptimal(PUR-PLSO)Universitas SriwijayaPalembang. (2012). Perbaikan Teknologi Pascapanen Padi di Lahan Suboptimal. In *Jurnal Lahan Suboptimal* (Vols. 186–196).
- Jakiah, U., Baga, L. M., Tinaprilla, N., Program Studi Magister Sains Agribisnis, Sekolah Pascasarjana IPB, & Departemen Ekonomi, Institut Pertanian Bogor. (2016). Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Usaha Tani Beras Organik di Provinsi Jawa Barat. In *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan: Vol. VOL.10 NO.1* [Journal-article].
- Maulana, T. M., Romano, Usman, M., & Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala. (n.d.). *Strategi Peningkatan Produksi Padi Melalui Upsus Pajale Dan*

- Kontribusinya Terhadap Peningkatan Ekonomi Di Kabupaten Aceh Besar*. Jurnal Bisnis Tani.
- Nuryanti, S. (2017). *Swasembada Beras Berkelanjutan: Dilema Antara Stabilisasi Harga Dan Distribusi Pendapatan*. Forum Penelitian Agro Ekonomi. DOI: 10.21082/fae.v35n1.2017.19-3
- Rahayu, S. E., & Febriaty, H. (2019). Analisis Perkembangan Produksi Beras dan Impor Beras di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 1(1), 219–226. <https://doi.org/10.30596/snk.v1i1.3613>
- Rahmadani, F., R., Setiowati, Luthfi, A. N., & Sekolah Tinggi Pertanian Nasional. (2019). Pencetakan Sawah Baru Dan Penguatan Aset Tanah Petani Untuk Ketahanan Pangan. In *Jurnal Tunas Agraria* (Vol. 2, Issue 1).
- Rozci, F., 1\* & Department Agribusiness, Faculty of Agriculture, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, East Java, Indonesia. (2021). DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP SEKTOR PERTANIAN PADI. In *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis (JISA)* (Vol. 23, Issue Nomor 2, pp. 108–116) [Journal-article].
- Sari, M., & Sjah, T. (2015). IMPLEMENTATION OF SPECIAL PROGRAM OF PAJALE (RICE, CORN AND SOYBEAN) IN TERARA DISTRICT, EAST LOMBOK REGENCY [Journal-article]. *Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Lahan Kering, Universitas Mataram*, 182–183. <https://doi.org/10.29303/agrimansion.v16i3.17>
- Sholikhah, M., Anjani, M. D., & Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia. (2023). Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Kenaikan Harga Beras di Indonesia. In *JESS: Journal of Economics and Social Sciences* (pp. 122–130) [Journal-article]. <https://journal.civiliza.org/index.php/jess>
- Sintiya, E. S. & Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Malang. (2023). Analisis Ketersediaan Beras Menggunakan Sistem Dinamik Sebagai Pendukung Kebijakan Ketahanan Pangan. In *TECNOSCIENZA* (Vols. 7–7).
- Sudarwati, N. L., & Nasution, N. F. (2024). Upaya Pemerintah dan Teknologi Pertanian dalam Meningkatkan Pembangunan dan Kesejahteraan Petani di Indonesia. *Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.32734/jkakp.v3i1.15847>
- Sudiyarti, N., Kurniawansyah, & Faradila, J. (2022). PENGARUH BIAYA PESTISIDA DAN BIAYA PUPUK TERHADAP PENDAPATAN PETANI DI DESA SERADING KECAMATAN MOYO HILIR. In Universitas Samawa, *Universitas Samawa* (Vol. 10, Issue 1, pp. 11–18) [Journal-article]. <http://e-journalppmunsa.ac.id/index.php/jeb>
- Suyono & Martono Achmar. (2013). DAMPAK KENAIKAN HARGA BBM TERHADAP PENDAPATAN USAHATANI

PADI SAWAH DI DESA  
BUGEMAN KEC. KENDIT  
(Studi Kasus Di Desa Bugeman  
Kecamatan Kendit Kabupaten  
Situbondo). *Jurnal Ilmiah  
Agribios*.

Wardhani, W. F. & Program Studi  
Agribisnis Universitas Bale  
Bandung. (2019). Peran Politik  
Pertanian Dalam Pembangunan  
Pertanian Menghadapi Era  
Revolusi Industri 4.0 Di Sektor  
Pertanian. In *Jurnal Ilmu Sosial  
Dan Ilmu Politik* (Vol. 3, Issue 2,  
pp. 83–84).